

BAB I

PENDAHULUAN

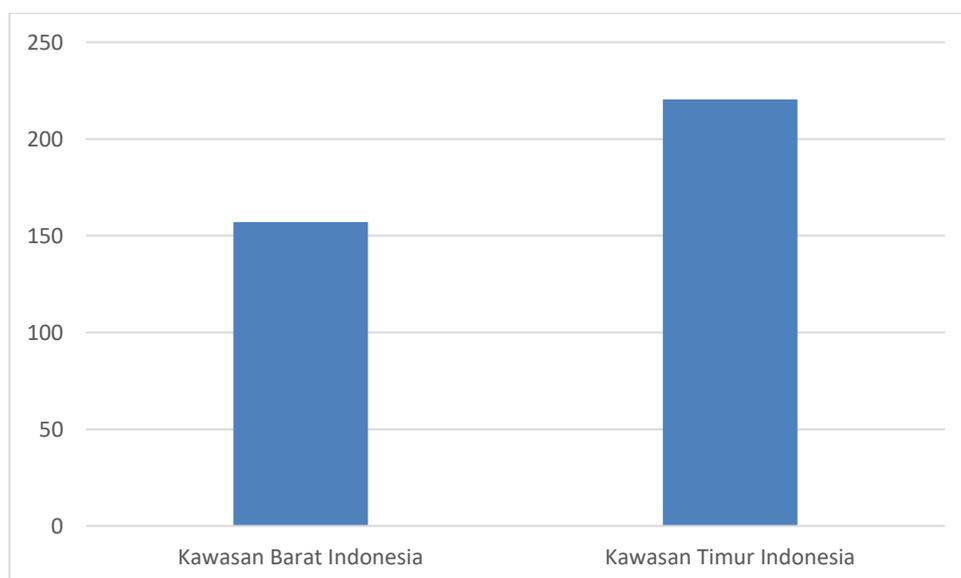
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan yang menjadi permasalahan yang bisa dibilang disetiap negara pasti ada dan berdampak pada indikator satu sama lain. Tentunya pemerintah sudah banyak menentukan solusi atas permasalahan tersebut dengan berbagai kebijakan yang dilakukan. Namun hal tersebut tidak berubah signifikan. Pemerintah terus berusaha mencari faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi permasalahan yang kompleks tersebut. (Susanti, 2013). Karena untuk membangun pertumbuhan ekonomi bukan hanya fokus pada pertumbuhan PDB saja, melainkan harus diatasi pada faktor-faktor lain contohnya seperti pengentasan kemiskinan, tersedianya lapangan pekerjaan, penanggulangan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh pengalihan tenaga kerja menjadi teknologi yang canggih yang salah satunya bisa berdampak pada penyerapan lapangan pekerjaan. Bayangkan saja, jika pemerintah mampu menyediakan program dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut akan mendorong perekonomian terus berkembang kearah yang lebih baik (Program et al., n.d.).

Sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan telah menjadi masalah fenomenal karena pemerintah belum memiliki pendekatan dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat, yaitu program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar membantu orang-orang yang paling miskin. Sering kali, kebijakan pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan tidak

memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin. Kemiskinan telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, peningkatan arus urbanisasi, dan, yang lebih parah lagi, jutaan orang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Terdapat 34 provinsi di Indonesia yang dibagi menjadi 2 tata wilayah administrasi menurut Permendagri No. 56/2015, diantaranya Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kedua wilayah tersebut menunjukkan kecenderungan pada provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mengalami kemajuan ekonomi yang bisa dibilang pesat.



Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Gambar 1. 1 Rata-Rata Tingkat Kemiskinan di Wilayah KBI dan KTI

Pada gambar 1.1 di atas merupakan data tingkat kemiskinan dari kedua

wilayah kawasan pembangunan yaitu terdiri dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kawasan Barat Indonesia terdiri dari Pulau Sumatra, Jawa dan Bali, sedangkan Kawasan Timur Indonesia terdiri dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Kawasan Timur Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Kawasan Barat Indonesia. Dengan rata-rata tingkat kemiskinan wilayah Kawasan Barat Indonesia sebesar 157,01 persen sedangkan wilayah Kawasan Timur Indonesia sebesar 220,41 persen.

Sebelum lebih jauh, definisi dari kemiskinan itu sendiri adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu pada indikator tingkat kemiskinan yang tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Teori Kultural mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kurangnya efektivitas partisipasi dalam lembaga utama masyarakat, diskriminasi, dan apatis. Konsep kemiskinan kultural mengatakan bahwa orang miskin tersebut disebabkan karena menganggap dirinya miskin. Selain itu penyebab kemiskinan pun disebabkan karena pertumbuhan penduduk tanpa diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.

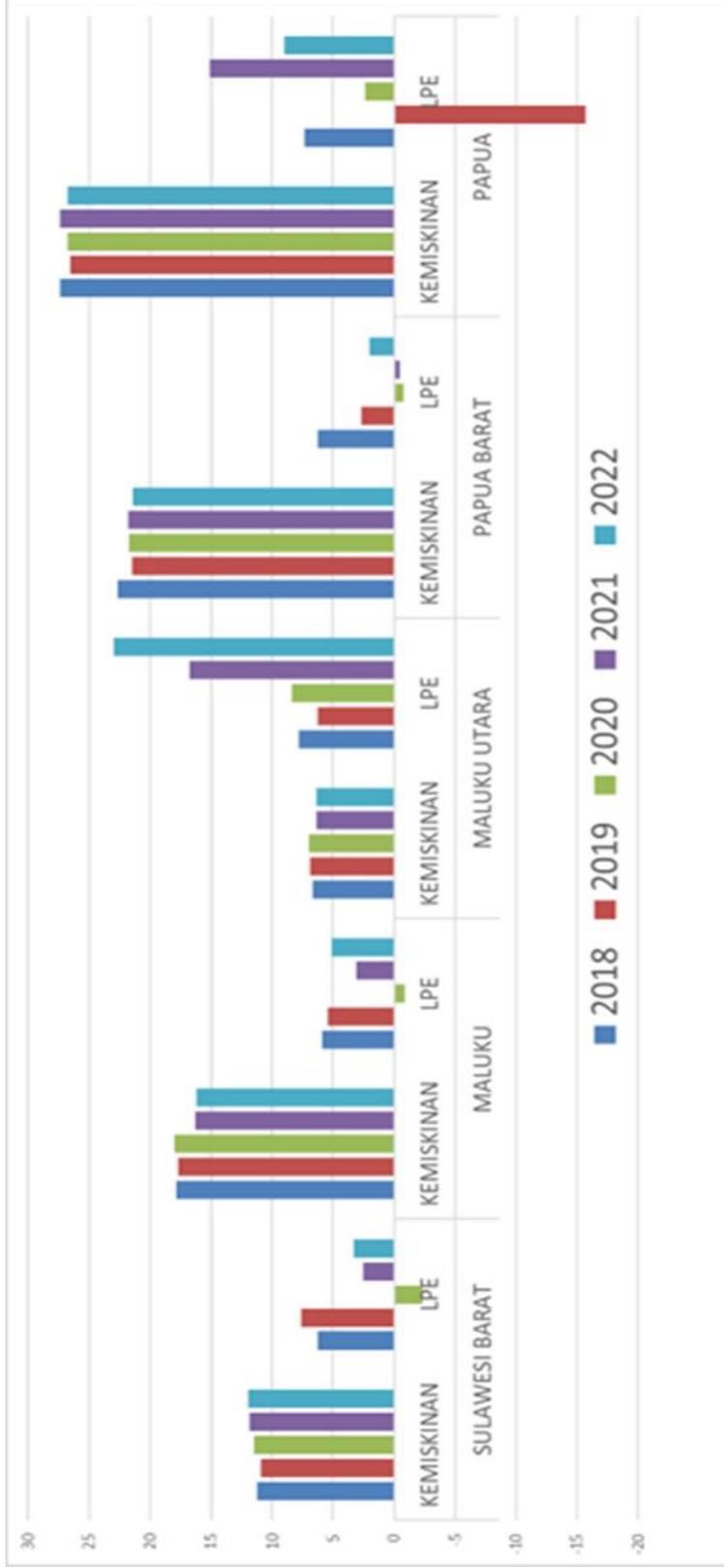
Kajian teori yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dimana ia menyatakan "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Produktivitas yang rendah disebabkan oleh keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, serta modal yang terbatas atau kurang. Oleh karena produktivitas rendah maka upah yang diterima juga rendah. Pendapatan rendah

akan membatasi jumlah besaran tabungan dan investasi. Investasi yang rendah akan menimbulkan keterbelakangan karena produktivitas yang rendah. Oleh sebab itu setiap kegiatan dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan semestinya memotong lingkaran atau penyebab kemiskinan tersebut.

Menurut Todaro, akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku akan meningkatkan stok modal fisik suatu negara dan memungkinkan peningkatan output di masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai dengan berbagai investasi penunjang yaitu investasi infrastruktur sosial dan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan penduduk yang lebih besar meningkatkan ukuran pasar domestik. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, sumber-sumber pertumbuhan tersebut dapat menurunkan kemiskinan.

Teori Rostow menekankan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mempersiapkan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Efek dari pengeluaran pemerintah melalui sarana prasarana dapat mengurangi total kemiskinan yang terjadi.



Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022

Pada gambar 1.2 menunjukkan kemiskinan 5 provinsi dari tahun 2018-2022. Secara keseluruhan kemiskinan 5 Provinsi di atas stabil namun cenderung naik. Dari kelima provinsi tersebut, provinsi dengan kemiskinan tertinggi yaitu Provinsi Papua, disusul Provinsi Papua Barat, selanjutnya Provinsi Maluku. Dipilihnya Wilayah Timur Indonesia di atas yang antaranya Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua karena menurut artikel CNBC Indonesia, dari 38 Provinsi didominasi oleh wilayah timur. Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan sebesar 0,27 persen. Namun demikian, dari tahun 2019 – 2022 cenderung naik setiap tahunnya. Dari tahun 2019 – 2020 naik 0,55 persen. Lalu dari tahun 2020 – 2021 naik sebesar 0,35 persen. Lanjut tahun 2021 – 2022 naik lagi sebesar 0,07 persen. Provinsi yang cenderung naik selanjutnya yaitu provinsi Maluku Utara dari tahun 2018 – 2019 naik sebesar 0,29 persen. Lalu dari tahun 2019 – 2020 naik sebesar 0,06 persen. Sedangkan dari tahun 2020 – 2021 turun sebesar 0,69 persen. Lalu naik kembali tahun 2022 sebesar 0,01 persen. Meskipun provinsi lain mengalami penurunan namun cenderung naik, namun demikian angkanya masih yang tertinggi dibanding provinsi lain di wilayah timur.

Pertumbuhan ekonomi ini seharusnya diikuti dengan tingkat kemiskinan yang menurun, namun tidak demikian dengan gambar 1.1, pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik atau meningkat justru diikuti pula dengan tingkat kemiskinan yang cenderung naik atau meningkat.

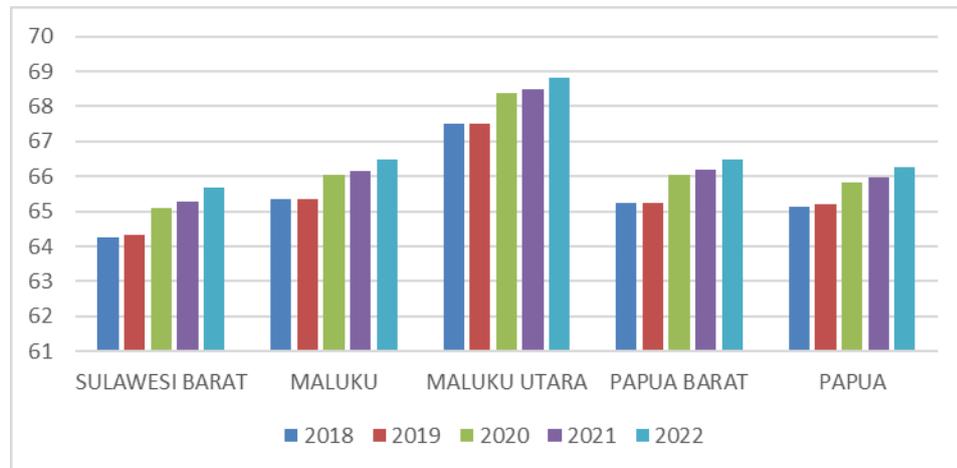
Menurut Laporan Monitoring Global tahun 2005 Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan global

dan menurunkan kemiskinan. Bisa dikatakan bahwa tidak kemungkinan untuk mengurangi jumlah orang miskin jika ekonomi tidak berkembang. Wongdesmiwati dalam (Kumalasari, 2011) melakukan penelitian yang menemukan bahwa ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan betapa pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. seperti halnya dalam penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2011). Namun hal tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad, dkk. (2018) dengan judul penelitian "*The Effect of Economic Growth and Income Inequality on Poverty in Indonesia*". Hasil dari penelitian tersebut PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena pengaruh yang tidak langsung untuk pengentasan kemiskinan. Pengaruh langsung dirasakan justru melalui IPM.

Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan sebagai pengukuran perkembangan suatu perekonomian pada suatu wilayah atau daerah karena hal tersebut berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ini pun menjadi tolok ukur kesejahteraan ekonomi dan penduduk suatu daerah atau wilayah. Gambar 1.2 ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi wilayah timur dari tahun 2018-2022.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat seharusnya diikuti dengan tingkat kemiskinan yang menurun. Namun tidak halnya dengan Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang justru dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik pula. Jika dilihat dari gambar 1.2 tersebut, Provinsi Maluku dari tahun 2020 – 2022 mengalami kenaikan. Lalu provinsi Maluku Utara cenderung naik pesat dari tahun 2020 – 2022. Meskipun diterpa fenomena Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang turun, namun tidak dengan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat yang justru mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan cukup tinggi.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tentunya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Dalam penyusunan skripsi ini, yang menjadi indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan indikator dari kesehatan yaitu angka harapan hidup. Perbandingan kesejahteraan akan sebanding dengan kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Jika pendidikan pada suatu negara meningkat, akan meningkatkan pula kualitas pendidikan pada suatu negara. Begitu pun sebaliknya, negara dengan kualitas pendidikan yang rendah diikuti dengan sumber daya manusia yang rendah akan meningkatkan angka kemiskinan suatu negara. Hal tersebut akan berdampak pula pada indikator lain yaitu pendapatan. Pendidikan yang tinggi, diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan.



Sumber: BPS, Statistik Indonesia.

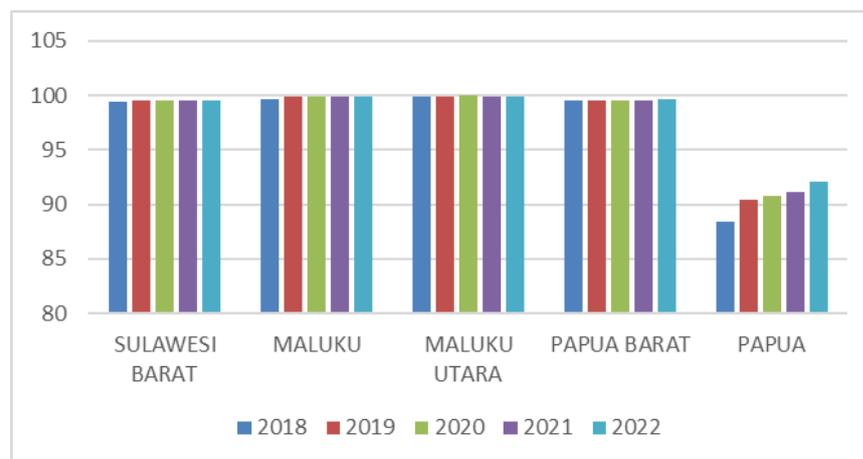
Gambar 1. 3 Angka Harapan Hidup di 5 Provinsi Wilayah Timur

Angka harapan hidup adalah tahun rata-rata yang akan dijalani oleh bayi baru lahir. BPS menyatakan bahwa AHH dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dilihat dari gambar 1.3, diantara 5 provinsi, provinsi dengan angka harapan hidup paling tinggi yaitu provinsi Maluku Utara. Tahun 2018 angka harapan hidup di Provinsi Maluku Utara memiliki usia hidup antara 67 – 68 tahun. Sedangkan provinsi yang memiliki AHH terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan semua provinsi memiliki usia hidup yang meningkat setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan Samsubar Saleh dalam (Kumalasari, 2011) terkait pengaruh angka harapan hidup terhadap kemiskinan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian yang disebut sebagai "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara", Apriliyah S. Napitulu dalam (Kumalasari, 2011) menemukan bahwa konsumsi per kapita, angka harapan hidup, dan angka melek huruf memberikan pengaruh negatif terhadap

tingkat kemiskinan.

Beberapa peneliti menemukan bahwa angka harapan hidup tidak selamanya mampu menurunkan kemiskinan. (Gunawan, 2020) menyatakan bahwa dengan meningkatnya angka harapan hidup justru dapat meningkatkan pula angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan pertambahan penduduk yang jika angka harapan hidup meningkat dan tidak diimbangi dengan pengendalian pertumbuhan populasi atau peningkatan lapangan pekerjaan yang menyebabkan tekanan ekonomi yang lebih besar. Selain itu biaya perawatan Kesehatan yang tinggi atau system perlindungan sosial yang lemah menjadi penyebab beban finansial yang cukup signifikan.



Sumber: BPS, Statistik Indonesia.

Gambar 1. 4 Angka Melek Huruf di 5 Provinsi Wilayah Timur Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.3, angka melek huruf pada 5 provinsi yaitu Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua tahun 2018 – 2022, cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Jika kemiskinan berkaitan erat dengan semakin sempit kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia sebaliknya. Konsep Pembangunan manusia adalah

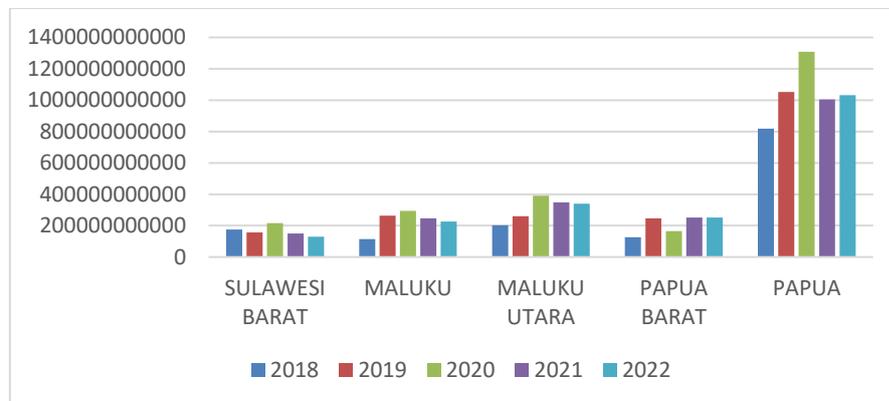
memperluas pilihan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Terdapat korelasi yang berlawanan, sehingga diharapkan persentase penduduk miskin di daerah yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang baik akan rendah.

(Dores & Jolianis, 2015) menemukan bahwa angka melek huruf berpengaruh negative signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, hal ini berarti semakin tinggi angka melek huruf maka semakin berkurang tingkat kemiskinan. Peningkatan mutu pendidikan ini dianggap sebagai suatu usaha yang dijadikan seseorang atau kelompok untuk mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih berkualitas.

Adapun peneliti (Natari, 2022) justru menemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara angka melek huruf terhadap kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan belum mencerminkan perbaikan kemampuan dan keterampilan yang menyebabkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Selain pendidikan dan pendapatan yang menjadi tolok ukur kemiskinan, suatu negara atau wilayah dengan infrastruktur yang baik pun menjadi suatu pengukuran tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Tersedianya infrastruktur yang memadai justru akan memperbaiki keadaan kemiskinan suatu wilayah. (Tinambunan et al., 2019). Pengeluaran pemerintah, khususnya di bidang kesehatan sangat penting dalam hal perbaikan Pembangunan manusia yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Pengalokasian anggaran kesehatan pada wilayah di Indonesia Timur berbeda jauh dibandingkan dengan

wilayah Indonesia bagian barat.



Sumber: Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan

Gambar 1. 5 Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan di 5 Provinsi Wilayah Timur Tahun 2018- 2022

Menurut Mangedaby dan Sugiri dalam (Lutfi, 2018), peningkatan kualitas hidup dan kualitas pendidikan menunjukkan peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal, tetapi hal ini masih tidak merata di beberapa wilayah tertentu. Di era otonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan daerah. Semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin baik penilaian kinerja pemerintahan di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya dapat mendorong pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari infrastruktur yang lebih baik hingga pelayanan publik yang lebih baik, hingga yang paling penting, kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tolok ukur pengeluaran pemerintah yaitu anggaran infrastruktur fungsi kesehatan. Studi empiris yang dilakukan tidak sejalan dengan penelitian oleh Reza Mu'tiqul Azmi dan Jihad Lukis Panjawa (2022) mengatakan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan berpengaruh

positif. Artinya jika pengeluaran pemerintah naik, maka tingkat kemiskinan akan ikut naik.

Diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pergeseran struktur ekonomi karena hubungannya erat dengan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dampaknya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pula pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta pembentukan masyarakat yang adil dan makmur.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran infrastruktur fungsi kesehatan secara parsial terhadap kemiskinan di 5 provinsi wilayah Indonesia timur tahun 2012-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran infrastruktur fungsi kesehatan secara bersama-sama terhadap kemiskinan 5 provinsi wilayah Indonesia timur tahun 2012-2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran infrastruktur fungsi kesehatan secara parsial terhadap kemiskinan di 5 provinsi wilayah Indonesia timur tahun 2012-2022.

2. Untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran infrastruktur fungsi kesehatan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di 5 provinsi wilayah Indonesia timur tahun 2012-2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi kontribusi serta acuan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah terkait dalam hal membuat suatu kebijakan atau pembangunan yang lebih baik kedepannya. Diharapkan pula dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di 5 provinsi wilayah timur yaitu Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi civitas akademika terkait pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, pertumbuhan ekonomi, anggaran infrastruktur fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di lima provinsi wilayah timur tahun 2012 – 2022. Diharapkan pula sebagai bahan literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa maupun berhubungan.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan lingkup provinsi yakni provinsi Wilayah Indonesia Timur. Peneliti melakukan penelitian dengan data sekunder

yaitu publikasi laporan angka harapan hidup, angka melek huruf, laju pertumbuhan ekonomi, anggaran infrastruktur fungsi kesehatan melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan dan jurnal-jurnal terkait

1.5.2. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Matriks Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2023												Tahun 2024											
	Oktober	November				Desember				Januari				Februari				Maret						
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Pengajuan Judul																								
Penyusunan Proposal Skripsi																								
Sidang Proposal Skripsi																								
Revisi Proposal Skripsi																								
Penyusunan Naskah Skripsi																								
Sidang Skripsi																								
Revisi Naskah Skripsi																								